

KEKERASAN DI ASIA TENGGARA

Makalah

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Ujian Akhir Semester

Mata Kuliah Lembaga Lembaga Internasional

Dosen Pengampu: Dr. H. Ija Suntana, M.Ag



Disusun Oleh

Dede Roslinda NIM 1193030023

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH) VI/A

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

TAHUN 2022

## **KATA PENGANTAR**

Bismillaahirrohmaanirrahiim, segala puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat dan rahmat-Nya, kami dapat terus menjalankan tanggung jawab kami dalam menuntut ilmu. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah SAW yang telah memberi kita jalan dari zaman kegelapan hingga zaman benderang akan ilmu, sehingga kita dapat menyelesaikan makalah ini dengan baik tepat pada waktunya. Penulisan makalah ini dibuat guna memenuhi Mata Lembaga Lembaga Internasional mengenai isu isu internasional.

Dalam penyusunan makalah ini, kami selaku penyusun menyadari bahwa masih banyak kesalahan, kekurangan dan kekeliruan dalam penulisan. Sehingga kami berharap mendapatkan kritik dan saran dari pembaca, supaya kami bisa memperbaiki penyusunan makalah ini menjadi lebih baik daripada sebelumnya, demi mencapai ilmu yang bermanfaat.

Bekasi, Juli 2022

Penulis

## DAFTAR ISI KATA

PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	2
C. Tujuan.....	3
BAB II PEMBAHASAN.....	4
A. Islamfobia dan cara mengatasinya.....	4
B. Diskriminasi Minoritas Muslim.....	5
BAB III PENUTUP.....	9
Kesimpulan .....	9
DAFTAR PUSTAKA.....	10

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Hubungan internasional kontemporer merupakan ilmu yang tidak hanya memperhatikan hubungan politik antar negara saja tetapi juga sejumlah subyek lainnya seperti hak asasi manusia, perubahan transnasional, organisasi internasional, rezim internasional, lingkungan hidup dan lain sebagainya.<sup>1</sup> Sejak munculnya revolusi industri sampai sekarang, terdapat isu-isu baru yang menjadi perhatian hubungan internasional. Salah satunya adalah isu kekerasan agama di Asia Tenggara.

Ada beberapa faktor yang berkontribusi besar terhadap kekerasan agama di Asia Tenggara, seperti agenda strategis regional dari kekuatan besar; pemerintahan sipil yang lemah; kejahatan tritunggal dan fobia sarjana; kesenjangan kekayaan; dan jurnalisme terkooptasi. Hal tersebut mengakibatkan krisis kemanusiaan dan juga berdampak sosial.

Dalam ilmu Hubungan Internasional konsep Internasional Politics of the Environment merupakan suatu proses dimana persetujuan antara negara mengenai isu-isu yang dinegosiasikan, baik dengan cara menciptakan rezim maupun dengan cara menciptakan institusi internasional yang diperlukan.

Ada dua paradigma hubungan internasional dalam Islam: paradigma ekspansionisme dan idealisme. Kedua paradigma ini memiliki landasan dan perspektif yang berbeda. Paradigma ekspansionis menganggap bahwa prinsip dasar hubungan internasional adalah konflik sedangkan paradigma idealis menganggap bahwa prinsip dasar hubungan internasional adalah perdamaian.<sup>2</sup>

### **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah yang akan menjadi pembahasan yaitu:

---

<sup>1</sup> Perwita, Anak Agung dan Yanyan Mochamad Yani. Pengantar Ilmu Hubungan Internasional. 2005. PT. Remaja Rosdakarya: Bandung.

<sup>2</sup> Ija Suntana and Mahmud, 2018. International Relation Paradigm: A Perspective of Islamic Political Science. The Social Sciences, 13: 859-861.

1. Apa yang dimaksud Islamfobia dan bagaimana cara mengatasinya?
2. Apa penyebab Diskrimasi terhadap Minoritas Muslim?

### **C. Tujuan**

Sejalan dengan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mengenai Islamfobia dan cara mentasinya
2. Untuk mengetahui penyebab Diskrimasi terhadap Minoritas Muslim

## **BAB II PEMBAHASAN**

### **A. Islamofobia dan strategi mengatasinya**

Tren Islamofobia sebagai fenomena kekerasan agama di Asia Tenggara mengalami peningkatan, meski tidak setajam kebangkitan di negara-negara barat dan Eropa. Islamofobia di Asia Tenggara pun terjadi dengan terjadinya ketegangan etnis, kesenjangan ekonomi, dan munculnya organisasi keagamaan sayap kanan. Islamofobia di negara-negara Asia Tenggara yang mayoritas beragama Islam, seperti Malaysia dan Indonesia, terutama ketika kelompok minoritas dominan di bidang ekonomi (Osman, 2017).

Fenomena Islamofobia yang dapat diamati di Asia Tenggara pada khususnya dan di Asia pada umumnya adalah terjadinya penyiksaan terhadap Muslim Rohingya di Burma oleh para penganut Buddha fanatik yang diilhami oleh biksu Buddha dari para ekstremis dan penganiayaan Muslim oleh kelompok nasionalis Sri Lanka Buddha.

Ada trinitas kejahatan yang saling terkait, yaitu korupsi, terorisme, dan kejahatan transnasional (Shelley, 2005). Beberapa studi mengaitkan korupsi dan kekerasan politik dengan mempertanyakan apakah terorisme domestik suatu negara dapat digambarkan sebagai upaya untuk menekan korupsi rezim atau sebagai upaya rezim untuk memberikan pengaruh ketika saluran korupsi mengalami hambatan. Di beberapa negara, ditemukan bahwa aksi teror memiliki hubungan yang sangat erat dengan perilaku politik rezim. Praktik korupsi dalam pengelolaan sumber daya alam memiliki efek tanpa syarat terhadap terorisme transnasional dan domestik (Ajide et al., 2020).

Islamofobia yang semakin menggiurkan di Asia Tenggara adalah perilaku rezim politik di kawasan yang menggunakan ancaman kriminal untuk menekan lawan politiknya. Ancaman kriminal yang dilakukan oleh rezim pemerintah di Asia Tenggara terbukti menimbulkan sikap antagonistik dari kelompok fundamentalis Islam terhadap negara, yang tentunya akan menimbulkan ketegangan dalam negeri dan mengakibatkan polarisasi masyarakat antara partai-partai dan anti rezim. Kedua komunitas tersebut akan membangun persepsi politiknya atas identitas ideologisnya dan saling mencurigai, sehingga menimbulkan efek kebencian terhadap ideologi yang digunakan masing-masing. Akibatnya, Islamofobia akan meningkat sejalan dengan meningkatnya *Fobia sekuler*— istilah yang digunakan oleh Ray Comport (2016).

Aksi teror memiliki hubungan sebab akibat dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi positif di suatu daerah merupakan pertumbuhan negatif dari insiden kekerasan di wilayah tersebut. Estimasi data antara waktu dan data antar individu (*deret waktu penampang gabungan*) mengungkapkan bahwa beberapa upaya kesejahteraan mengurangi insiden terorisme transnasional di negara-negara yang melakukannya. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan kebijakan sosial di dalam dan di luar mungkin tidak hanya berkorelasi dengan target redistribusi atau pemerataan pembangunan tetapi juga membantu memerangi aksi kekerasan teroris (Burgoon, 2006).

Sebuah strategi perlu difikirkan dan dirancang ketika muncul fenomena sosial seperti Islamophobia. Ketika umat Islam memiliki harga diri, memang ia tidak perlu khawatir dengan ketakutan pihak lain terhadap Islam. Namun umat Islam akan lebih bermartabat bila yang muncul adalah rasa segan dan hormat karena Islam dipersepsikan membawa manfaat dalam kehidupan insan manusia. The Threats-Opportunities-Weaknesses-Strengths (TOWS) matrix adalah salah satu alat untuk membantu membangun empat tipe strategi. Adapun analisis TOWS Islam di Indonesia adalah seperti tampak pada tabel 2 berikut ini. Dari analisis TOWS tersebut dapat dibangun empat strategi yaitu strategi SO, strategi WO, strategi ST, dan strategi WT. Strategi ini memfokuskan pada faktor-faktor kunci secara internal maupun eksternal. Strategi SO adalah strategi yang menggunakan kekuatan internal untuk mengambil kesempatan eksternal; strategi WO adalah strategi membantu mengatasi kelemahan internal dengan mengambil kesempatan dari kekuatan eksternal; strategi ST adalah strategi menggunakan kekuatan internal untuk menurunkan ancaman/kekuatan dari luar; dan strategi WT adalah strategi dengan taktik defensif untuk mengurangi kelemahan internal dan menghindari ancaman eksternal (David, 1997).

Keempat strategi di atas membutuhkan partisipasi berbagai pihak. Dari komunitas Islam dibutuhkan suatu komitmen yang tinggi untuk memberikan gambaran yang sebenarnya tentang perilaku yang Islami, serta informasi yang tepat dan tuntas sehingga tidak terjadi bias persepsi terhadap Islam.<sup>3</sup>

## **B. Diskriminasi terhadap Minoritas Muslim**

---

<sup>3</sup> Moordiningsih, ISLAMOPHOBIA DAN STRATEGI MENGATASINYA, Buletin Psikologi, Tahun XII, No. 2, Desember 2004

Krisis Rohingya bukanlah konflik agama antara Islam dan Buddha, karena keduanya memiliki sejarah panjang hidup berdampingan secara damai, melainkan bentrokan antara dua pandangan nasionalisme untuk klaim kewarganegaraan) Burma (Yusuf, 2018. Rohingya menghadapi kebijakan diskriminasi pemerintah dan tindakan diskriminatif sejak lama, sejak kemerdekaannya pada tahun 1948. Pemerintah Burma mengecualikan Rohingya sebagai bagian dari negara, menyangkal identitas mereka, dan menyatakan bahwa mereka adalah imigran Bengali ilegal. serangan oleh biksu Buddha dan nasionalis Buddha lainnya, yang didukung oleh militer (Akins, 2018).

Minoritas Muslim di Myanmar juga mengalami diskriminasi, terutama etnis Rohingya. Hal ini tidak terlepas dari eksklusi pemerintah yang tidak mengakui etnis Rohingya sebagai warga negara Myanmar berdasarkan UU Kewarganegaraan tahun 1982. Anak-anak minoritas Muslim dilarang masuk ke sekolah publik . Bahkan, Human Rights Watch melaporkan bahwa beberapa anak di bawah umur dipaksa menjadi tenaga kerja tanpa diberi upah. Muslim Rohingya juga sering kali dipekerjakan sebagai tenaga kasar tanpa dibayar untuk membantu proyek yang dijalankan oleh pemerintah, seperti dalam proyek pembangunan jalan.

Mereka juga tidak diperbolehkan untuk bekerja di bidang pelayanan publik, seperti hukum, militer, atau kesehatan (Graham 2015). Hal ini dilakukan sebagai langkah untuk mencegah minoritas Muslim mendapatkan kekuasaan yang dapat digunakan memperjuangkan hak-hak asasi mereka sebagai manusia atau warga negara. Pemerintah juga memberikan pelayanan kesehatan yang sangat minimal bagi minoritas Muslim terutama etnis Rohingya. Salah seorang Muslim menyatakan bahwa di wilayah Rakhine tidak ada dokter, obat atau vaksin yang cukup untuk merawat pasien (Szep 2013). Dalam salah satu artikel yang dimuat di The Diplomat juga diketahui bahwa MSF (Medecine Sans Frontiers) atau “Doctors Without Borders” juga sempat dilarang masuk ke Myanmar ([www.thediplomat.com](http://www.thediplomat.com), diakses pada 12 Juni 2016). Dapat dikatakan ini adalah salah satu langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Myanmar untuk mengalienasi minoritas Muslim, terutama Rohingya.

Pemerintah Myanmar juga membatasi mereka membangun tempat ibadah (Kloes 2011). Meski aturan Kementerian Agama menyatakan memperbolehkan pembangunan atau perbaikan tempat ibadah sesuai dengan peningkatan jumlah pemeluk agama pada suatu wilayah, namun hal ini tidak berlaku bagi minoritas Muslim. Minoritas Muslim



mungkin hanya mendapatkan ijin di tingkat lokal. Mereka dipersulit mengurus ijin di tingkat yang lebih tinggi, umumnya prosesnya diperlambat atau ditolak. Pada akhirnya, jika mereka terbukti tetap membangun tempat ibadah tanpa ijin dr otoritas yang berwenang maka tempat ibadah yang sudah terbangun harus dihancurkan.

Beberapa desa di Myanmar melarang Muslim masuk ke dalam wilayahnya. Kebencian dan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok Buddha ekstrimis pada akhirnya juga menimbulkan ketakutan pada minoritas Muslim di Myanmar sehingga mereka berupaya untuk mencari tempat yang aman ke daerah daerah lainnya. Namun hal tersebut tidak dapat dilakukan, karena penduduk di desa atau wilayah tersebut juga takut mendapat serangan dari kelompok Buddha ekstrimis jika terbukti melindungi atau berafiliasi dengan minoritas Muslim.

Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa minoritas Muslim terisolasi di wilayahnya sendiri. Minoritas Muslim yang ingin melarikan diri pada akhirnya hanya terdampar di tenda-tenda pengungsian. Mereka tidak dapat keluar lintas batas negara karena Pemerintah Myanmar dan negara-negara lain menerapkan kebijakan yang sangat ketat di wilayah perbatasan. Mereka juga tidak dapat kembali ke rumahnya karena sudah hancur akibat kekerasan yang dilakukan oleh kelompok Buddha ekstrimis. Selain itu, trauma atas kekerasan dan pelanggaran HAM yang terjadi membuat mereka enggan untuk kembali.<sup>4</sup>

Krisis Rohingya memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi, dimana pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, baik pelaku maupun korban persekusi, mengaku sebagai pihak yang dirugikan. Pelaku merasa dirugikan oleh korban yang tertindas, demikian pula korban mengaku sebagai pihak yang dirugikan. Kampanye militer yang dilakukan terhadap Muslim Rohingya oleh tentara pada tahun 2016 dan 2017 juga didasarkan pada perasaan dirugikan oleh pihak yang menjadi sasaran (Holt, 2019). Dan, yang paling rusak dari “konflik kerugian” tersebut adalah agama, yang dianggap sebagai sumber perilaku kekerasan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya (Gier, 2014).<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Renitha Dwi Hapsari, Islamophobia dan Tindakan terhadap Minoritas Muslim oleh Pemerintah dan Kelompok 969 di Myanmar Tahun 2012-2016, *Global & Policy* Vol.4, No.2, Juli-Desember 2016

<sup>5</sup> Suntana, I., & Tresnawaty, B. (2021). Multidimensional Social Crisis and Religious Violence in Southeast Asia: Regional Strategic Agenda, Weak Civilian Government, Triune Crime, Wealth Gaps, and Coopted Journalism. *Journal of Culture and Values in Education*, 4(2), 1-13. <https://doi.org/10.46303/jcve.2021>.

## **SIMPULAN**

Phobia dianggap sebagai bentuk khusus ketakutan. Kecemasan dalam phobia dialami apabila seseorang menghadapi objek atau situasi yang ditakuti atau dalam antisipasi akan menghadapi kondisi tersebut. Sebagai tanggapannya, orang menunjukkan tingkah laku penghindaran yang merupakan ciri utama semua phobia.

Fenomena Islamophobia bisa dianggap sebagai prasangka dalam sebuah komunitas masyarakat, namun prasangka tersebut dapat menimbulkan konflik sosial yang berkepanjangan serta merugikan bagi suatu komunitas masyarakat. Islamophobia telah membuat minoritas Muslim di Myanmar mengalami kekerasan, diskriminasi, eksklusi dan prasangka buruk. Kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah yang cenderung pro terhadap kelompok Buddha ekstrimis guna terus mendapatkan dukungan dan legitimasi, justru memperlihatkan bahwa Pemerintah Myanmar tidak dapat melepaskan diri dari pengaruh pemeluk Buddha.

Pemahaman yang benar dan positif, keterbukaan pandangan serta kejernihan sikap hidup dan kualitas mental dalam menerima keberadaan kelompok lain akan membantu masing-masing kelompok dalam komunitas masyarakat di dunia ini untuk berkompetisi secara sehat dan menunjukkan keunggulan yang lebih bermanfaat bagi masyarakat luas.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Moordiningsih, ISLAMOPHOBIA DAN STRATEGI MENGATASINYA, Buletin Psikologi, Tahun XII, No. 2, Desember 2004

Renitha Dwi Hapsari, Islamophobia dan Tindakan terhadap Minoritas Muslim oleh Pemerintah dan Kelompok 969 di Myanmar Tahun 2012-2016, Global & Policy Vol.4, No.2, Juli-Desember 2016

Perwita, Anak Agung dan Yanyan Mochamad Yani. Pengantar Ilmu Hubungan Internasional. 2005. PT. Remaja Rosdakarya: Bandung.

Suntana, I., & Tresnawaty, B. (2021). Multidimensional Social Crisis and Religious Violence in Southeast Asia: Regional Strategic Agenda, Weak Civilian Government, Triune Crime, Wealth Gaps, and Coopted Journalism. *Journal of Culture and Values in Education*, 4(2), 1-13. <https://doi.org/10.46303/jcve.2021>.

Ija Suntana and Mahmud , 2018. International Relation Paradigm: A Perspective of Islamic Political Science. *The Social Sciences*, 13: 859-861

